

KOLABORASI MULTI PIHAK PADA PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN CILACAP

Jaka Ramdani

Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

E-mail: jaka20001@mail.unpad.ac.id

Risna Resnawaty

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

E-mail: risna.resnawaty@unpad.ac.id

ABSTRAK

Program Kampung Iklim (PROKLIM) merupakan implementasi CSR dari PT Pertamina yang menggambarkan adanya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaannya, antara lain: masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. PROKLIM memiliki tujuan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berisiko pada seluruh lapisan masyarakat, untuk mengetahui bentuk kolaborasi multipihak dan implementasi program lapangan memerlukan pengkajian mendalam. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dianalisa dalam sudut pandang pembangunan berkelanjutan. Lokasi penelitian meliputi Desa Ujungalang, Desa Panikel, dan Kelurahan Kebonmanis, dengan sasaran informan adalah pelaksana program di tingkat desa dan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PROKLIM (Program Kampung Iklim) sudah memenuhi aspek-aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Akan tetapi pada implementasi program belum menjangkau kelompok-kelompok rentan. Keterlibatan multipihak pada implementasi PROKLIM memiliki peran penting, salah satunya adalah dana CSR Pertamina yang memberikan dukungan berupa pendampingan dan fasilitasi infrastruktur pendukung. Perlunya ada evaluasi terkait implementasi program agar penerima manfaat dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga pembangunan berkelanjutan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat tercapai.

Kata kunci: perubahan iklim; kolaborasi; multipihak; CSR; berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan suatu peristiwa yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat semakin rentan terhadap bencana multidimensi seperti bencana banjir, longsor, rob atau abrasi pantai, kekeringan, angin topan, dan bencana lainnya yang terjadi dalam rentang waktu bersamaan atau tidak terlalu lama. Bencana multidimensi ini seringkali terjadi di Indonesia, sebagai salah satu contoh bencana multidimensi pada tahun 2021 terjadi di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu bencana Siklon Tropis Saroja, yang dimana dalam waktu bersamaan terjadi bencana banjir bandang (Aryaseta, B, 2021), tanah longsor, angin topan, dan rob

dan abrasi pantai. Ekosistem darat dan laut terjadi perubahan yang signifikan yaitu terjadi perubahan morfologi (bentuk wilayah), jika ditinjau dari sudut pandang bencana hal tersebut adalah salah satu dampak kerusakan yang diakibatkan oleh alam. Peristiwa bencana multidimensi akibat perubahan iklim tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Memandang peristiwa tersebut berdampak kerugian besar pada masyarakat lokal terutama kelompok yang dikategorikan memiliki kerentanan sangat tinggi yaitu anak-anak, disabilitas, lanjut usia dan keluarga miskin (Putri, T. D., Sunarsih, S., & Muhammad, F, 2019) dan keberlanjutan kehidupan serta matapencahariannya (Deny Hidayati dkk, 2020).

Beberapa kajian penelitian menunjukkan dampak perubahan iklim akan sangat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir. Khususnya yang bertempat tinggal di pemukiman kumuh wilayah pesisir memiliki kerentanan sangat tinggi (Wulandari, M. A, 2013) yang dimana aksesibilitas, kondisi lingkungan hidup, dan sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir mengandalkan pada kondisi pesisir dan kelautan (Subair, S., Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B, 2014).

Berdasarkan hasil perhitungan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan tahun 2017 menunjukkan hasil bahwa dari total desa di Indonesia yaitu 82.190 desa, terdapat desa yang masuk kelas kerentanan Sangat Tinggi sejumlah 2.400 (2,92%) dan kelas kerentanan Tinggi sejumlah 4.881 (5,94%). Desa yang masuk kelas kerentanan Sedang sejumlah 59.458 (72,34%). Sedangkan desa yang masuk kelas kerentanan rendah sejumlah 7.085 (8,62%) dan sangat rendah sejumlah 8.366 (10,18%). Diperkuat bahwa hingga saat ini pranata kelembagaan diketahui kurang mampu memberikan daya tahan sosial masyarakat (Wahyono, A, 2018), hal tersebut jika tidak dilakukan segera peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Dalimunthe, dkk (2017) mendefinisikan kerentanan adalah suatu kondisi yang ‘mengancam’ atau beresiko bagi masyarakat karena faktor alami dan non alami. Kerentanan masyarakat jika tidak segera ditangani maka masyarakat akan berada pada posisi terancam bencana, kemiskinan meningkat, dan munculnya permasalahan multidimensi lainnya. Faktor penyebab salah satunya adalah kurangnya adaptasi dan mitigasi sedini mungkin pada masyarakat. Program Kampung Iklim atau sering dikenal dengan PROKLIM menjadi solusi meningkatkan resiliensi berbasis komunitas atau masyarakat melalui

internalisasi upaya adaptasi dan mitigasi bencana yang baik. Kemampuan beradaptasi dan mitigasi masyarakat akan memperkuat masyarakat untuk bertahan dan mengurangi risiko terhadap perubahan iklim untuk keberlanjutan *livelihood*-nya. PROKLIM juga dapat dikategorikan sebagai program perlindungan sosial dalam hal ini pada tahap preventif (pencegahan) agar masyarakat rentan tidak mengalami krisis ketika terjadi dampak perubahan iklim yang dialaminya. Dunia usaha memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelestarian lingkungan, salah satunya adalah Pertamina yang mengalokasikan CSR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan pada PROKLIM.

PROKLIM diharapkan mampu menjadi wadah edukasi masyarakat untuk menjadi agen perubahan dilingkungan tempat tinggalnya sehingga tumbuhnya transfer ilmu pada masyarakat rentan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah sekitar penerapan program. Oleh karenanya, pentingnya pengkajian tentang kolaborasi multipihak pada Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kabupaten Cilacap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara umum menggunakan metode kualitatif dengan analisis pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh, penulis mengkolaborasikan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara daring di tiga desa Kabupaten Cilacap yaitu Desa Ujungalang (Kec. Kampung Laut), Kelurahan Kebonmanis (Kec. Cilacap Utara, dan Desa Mrenek (Kec. Maos). Wawancara dilakukan kepada tiga informan yaitu Pengelola Program Kampung Iklim di tingkat Desa atau Kelurahan untuk memperoleh data primer

tentang kendala dan implementasi Program Kampung Iklim pada lokasi program, Wawancara dilaksanakan 14 dan 15 Juni 2021. Adapun wawancara juga dilakukan kepada tiga informan ditingkat RW (bu RW), dan masyarakat kategori sangat rentan (disabilitas, anak-anak, lansia, dan keluarga miskin). Data sekunder berasal dari tinjauan laporan, data, dan atau jurnal yang menunjang keabsahan data. Berikut ini data sekunder yang penulis peroleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dan Laporan Kabupaten Cilacap dalam Angka Tahun 2021, yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Pesebaran Masyarakat Sangat Rentan di Lokasi Program Kampung Iklim

No	Desa atau Kelurahan	Masyarakat Kategori Sangat Rentan			
		Anak (0-19 th)	Disabilitas	Lanjut Usia (>60 th)	Keluarga Miskin
1.	Desa Ujungalang	1.238 Jiwa	40 jiwa	463 Jiwa	393 KK
2.	Kelurahan Kebon manis	4.983 Jiwa	16 jiwa	531 Jiwa	93 KK
3.	Desa Mrengek	1.290 Jiwa	30 jiwa	687 Jiwa	152 KK

Sumber: DTKS dan Laporan Kab. Cilacap dalam Angka Tahun 2021 (Data diolah)

Pada Tabel 1 menunjukkan persebaran yang cukup banyak dimasing-masing lokasi implementasi Program Kampung Iklim. Jika kelompok yang dikategorikan sangat rentan tersebut tidak mendapatkan prioritas atau tidak terakses secara merata manfaat Program Kampung Iklim maka akan berdampak pada krisis disuatu masa nanti pada masyarakat tersebut. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena di

Kabupaten Cilacap telah meimplementasikan Program Kampung Iklim (PROKLIM) di tiga desa atau kelurahan, sehingga data sesuai dengan yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Iklim merupakan terjadinya pergeseran yang mendasar parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembapan, angin, tutupan awan dan penguapan pada bumi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gagal panen, serta meningkatnya wabah penyakit (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2018). Menurut Novandi et al., (2019) dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi dalam melakukan aktifitas sehari-hari misalnya menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Dengan dilakukannya upaya adaptasi pada masyarakat rentan khususnya masyarakat miskin terhadap dampak perubahan iklim, maka ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.

Upaya pemerintah merespon dan mengurangi risiko dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi, pemerintah membuat sebuah program yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim (PROKLIM). Program tersebut untuk mendorong kerjasama multi-pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM). Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka

meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Adapun profil program tersebut memiliki investasi Pembangunan Berkelanjutan yang tinggi yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu program. Selain itu, program PROKLIM juga termasuk dalam upaya prefentif dalam kerangka model perlindungan sosial adaptif yang sedang dikembangkan di Indonesia. PROKLIM masuk kedalam program strategis jangka menengah nasional yang terus digencarkan hingga tahun 2030 dengan target pada tahun 2025 sejumlah 20.000 desa atau kelurahan.

PROKLIM (Program Kampung Iklim) menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat (*Community Based Development*), dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat beserta institusinya dalam memobilisasi dan mengelola sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di dalam desa maupun yang berasal dari luar desa diarahkan untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas didorong untuk dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi masyarakat di masa depan dengan terjadinya perubahan iklim. Pemahaman mengenai tingkat kerentanan, potensi dampak dan proyeksi iklim dengan bertambahnya suhu permukaan bumi perlu dibangun, sehingga masyarakat mampu memilih jenis aksi adaptasi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim.

Penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak melalui ProKlim

sangat diperlukan terutama pada daerah yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada saat kerentanan dapat diatasi dengan upaya peningkatan kapasitas adaptasi, yang kemudian menjadi hal yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan (resiliensi) terhadap perubahan iklim. Resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan kapasitasnya. Ketahanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk menolak, menyerap, dan pulih dari efek bahaya secara tepat waktu dan secara efisien, menjaga atau pemulihan pengutamaan struktur dasar, fungsi dan identitas.

Profil Program Kampung Iklim yang memperoleh dukungan dana CSR Pertamina sebagai berikut:

1. *Goals and Objectives* (Tujuan dan Sasaran) Tujuan PROKLIM (Program Kampung Iklim) yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak Perubahan Iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim yang telah dilakukan oleh masyarakat pada suatu lokasi. Sasaran pada program ini yaitu meningkatnya efektifitas ketahanan adaptasi dan mitigasi risiko perubahan iklim (Peraturan Menteri-LHK Nomor 39/2015 tentang Renstra KLHK).
2. Manfaat Program Kampung Iklim PROKLIM memiliki manfaat sosial, ekonomi, lingkungan pengurangan risiko iklim dengan keberlanjutan pada penguatan data pengendalian perubahan iklim, pengembangan masyarakat dan kapabilitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Adapun lingkup

kegiatan PROKLIM yaitu identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim, identifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat, penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal, pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lingkup tersebut dikemas dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi pelaksanaan, dan pembangunan bank data PROKLIM.

3. Penerima Manfaat

Karakteristik penerima manfaat dalam program ini adalah masyarakat yang rentan terdampak bencana perubahan iklim khususnya masyarakat miskin yang berdomisili di area sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai), pesisir pantai, daerah gambut, pegunungan yang gundul. Selain itu, program ini mendorong inisiasi dalam kelompok penggerak di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Secara konseptual, suatu kampung iklim terdiri dari masyarakat dan lingkungannya yang diharapkan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim yang sedang dan akan berlangsung. Guna meningkatkan ketahanan tersebut, maka suatu kampung iklim diharapkan mempunyai upaya-upaya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga dampak akibat perubahan iklim dapat

diminimalisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca pada skala tapak.

4. Struktur Pelaksanaan Program

Pada elemen ini tersusun struktur Pelaksana ProKlim yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim. Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendukung ProKlim terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan. Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ProKlim tidak hanya kelembagaan tingkat tapak, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Dinas Lingkungan Hidup) hingga Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam ProKlim.

5. Sumber Anggaran

Pembiayaan pada PROKLIM (Program Kampung Iklim) bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendaatan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat berasal dari keuangan swadaya masyarakat, CSR, dan dana desa. Implementasinya Program Kampung Iklim di Kabupaten Cilacap didukung dengan sumber anggaran dari CSR Pertamina.

Keterlibatan CSR memiliki nilai penting dalam pelaksanaan program. CSR yang berintegrasi dengan program pemerintah tersebut merupakan bentuk kolaborasi multipihak yaitu masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Dalam hal ini CSR Pertamina memberikan dukungan

berupa fasilitasi dan pendampingan Program Kampung Iklim seperti mengirimkan tenaga profesional. Selain itu, fasilitas infrastruktur seperti bantuan rumah bank sampah, tong sampah, gapura, alatpemilah sampah, green house, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Implementasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Studi kasus di ketiga desa atau kelurahan yang meliputi Desa Ujungalang (Kec. Kampung Laut), Kelurahan Kebonmanis (Kec. Cilacap Utara, dan Desa Mrenek (Kec. Maos). Peneliti mefokuskan kolaborasi multipihak pada PROKLIM, dampak CSR terhadap partisipasi masyarakat rentan terhadap Program Kampung Iklim. Selain itu, aktivitas berkelanjutan yang dilakukan masyarakat dalam menjangkau kelompok rentan. Menurut Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2012) terdapat 3 aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Pada implementasinya program terdapat temuan- temuan eksplisit dilapangan sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi

Dana CSR memberikan dukungan dalam hal pengembangan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) meliputi pembinaan, pendampingan, pemasaran, dan pengolahan. Yang dimana usaha yang ditekankan adalah usaha yang ramah lingkungan. Temuan dilapangan seiring berjalannya waktu prinsip-prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan tidak diterapkan oleh masyarakat hal ini tentunya memerlukan pengawasan program agar tercapainya tujuan program. Selain itu dalam aspek ekonomi belum menunjukkan kesetaraan hak dalam keterlibatan kelompok rentan seperti keluarga miskin, disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Dominasi peserta kegiatan dilakukan oleh ibu-ibu PKK yang berpenghasilan tinggi. Jika

Program Kampung Iklim ini dapat menysasar kelompok rentan tentunya akan meningkatkan ketahanan kelompok rentan jika terjadi krisis akibat perubahan iklim. Produk UMKM juga masih belum menggunakan bahan-bahan pembungkus produk yang ramah lingkungan dalam hal ini penggunaan plastik masih masif pada setiap produk. Jika ditinjau lagi dalam prinsip berkelanjutan salah satunya adalah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan akan tetapi pada implementasinya belum menunjukkan atau menggambarkan konsep yang baik. Temuan-temuan ini akan menyurutkan esensi Program Kampung Iklim yang didukung oleh Dana CSR.

2. Aspek Sosial

Pada aspek sosial pada Program Kampung Iklim adalah terciptanya pemberdayaan sosial yang berkelanjutan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Pada aspek ini idealnya dapat tumbuhnya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam bentuk Gerakan aktif menyelamatkan lingkungan dari dampak perubahan iklim. Implementasi di tiga desa ditemukan bahwa Program Kampung Iklim sudah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran dari dampak perubahan iklim akan tetapi partisipasi tersebut belum berjalan berkelanjutan, artinya masyarakat masih menganggap bahwa Program Kampung Iklim adalah sebatas event. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan dari Program Kampung Iklim yang turut didanai oleh CSR Pertamina.

3. Aspek Lingkungan

Pada aspek lingkungan pada Program Kampung Iklim mendorong percepatan pelestarian lingkungan agar dapat meminimalisir dampak perubahan iklim bagi masyarakat. Pada aspek ini sudah berjalan dengan pemberian fasilitas

berupa bank sampah, green house, alat pengolah limbah, dan lain sebagainya. Terjadi proses pelestarian lingkungan yang baik dan didukung dengan protokol ramah lingkungan. Dana CSR sangat mendorong percepatan pelestarian lingkungan melalui Program Kampung Iklim.

Analisis pada temuan dilapangan terkait dampak CSR terhadap kelompok rentan pada Program Kampung Iklim belum menunjukkan dampak yang signifikan. Kelompok rentan pada Program Kampung Iklim masih dianggap

kelompok yang lemah dan belum tersentuh dari manfaat program tersebut.

Sistem kolaborasi multipihak pada program ini harusnya dapat tersentuh dengan baik. Yang dimana terjadi pergerakan yang aktif pada masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Penjangkauan terhadap kelompok rentan akan menunjukkan kolaborasi yang konstruktif untuk tercapainya tujuan program. Kolaborasi multi pihak sangat didukung oleh persepsi serta partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholder), dan untuk meningkatkan persepsi serta partisipasi tersebut sangat didukung oleh peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat serta stakeholder lainnya. Kolaborasi multipihak dapat melibatkan partisipasi masyarakat dapat berperan penting ketika implementasi program yang bersifat sentralistik tidak berjalan efektif, salah satunya adalah untuk mengatasi terjadinya kesenjangan pemanfaatan program, yang dalam ini adalah Program Kampung Iklim. Kunci berjalannya program yang dapat menyentuh kelompok rentan adalah kolaborasi.

KESIMPULAN

Implementasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) di tiga desa yaitu Desa Ujungalang, Desa Panikel, dan Kelurahan Kebonmanis sudah memenuhi beberapa

aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Akan tetapi PROKLIM belum menyentuh kelompok rentan seperti lanjut usia, keluarga miskin, dan disabilitas yang dimana kelompok rentan tersebut memiliki potensial terkena krisis jika terjadi dampak perubahan iklim. Esensi PROKLIM seharusnya menekankan kolaborasi aktif dari multipihak seperti masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Masing-masing memiliki peranan yang penting dalam mendukung berjalannya PROKLIM dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Emilda, dkk. (2017). Buku Praktis Proklam. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Aryaseta, B. (2021). Detection Of Flood Impacted Areas In East Nusa Tenggara Using Sentinel-1 Imagery. *Journal of Civil Engineering Science & Technology CI-TECH*, 2(01), 37-41.
- Chambers, Donald & Bonk, Jane F. (2013). Social Policy and Social Programs a Method for The Practical Public Policy Analysis. *Pearson Education, Inc. United States of America*.
- Dalimunthe, dkk. (2017). Pemetaan Kerentanan Masyarakat Provinsi Jambi Menghadapi Bencana. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.
- Israr Albar, dkk. (2017). *Road Map Program Kampung Iklim*. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Perdian, dkk. (2017). *Studi Perubahan*

Iklim di Indonesia Perkembangan Studi Kerentanan, Risiko, Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim: Tantangan dan Peluang. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan

Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pramudita Mahyastuti, dkk. (2021). *Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045.*

Kementerian PPN/Bappenas.

Putri, T. D., Sunarsih, S., & Muhammad, F. (2019). Analisis Kerentanan Sosial Masyarakat dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kampung Gemblakan Atas, Kota Yogyakarta. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 16, No. 1, pp. 256-264).

Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2012). *An introduction to sustainable development.* Earthscan.

S. Gatenio Gabel. (2016). *A Rights Based Approach to Social Policy Analysis.* Springer International Publishing Switzerland.

Subair, S., Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B. (2014). Resiliensi Komunitas dalam Merespon Perubahan Iklim melalui Strategi Nafkah (Studi Kasus Desa Nelayan di Pulau Ambon Maluku). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 77-90.

Wahyono, A. (2018). Ketahanan Sosial Nelayan: Upaya Merumuskan Indikator Kerentanan [Vulnerability] Terkait Dengan Bencana Perubahan Iklim. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 185-199.

Wibowo, A., dkk. (2017). *SIDIK Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan.* Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wulandari, M. A. (2013). Tipologi Kerentanan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Kota Tegal. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2(1), 85-93.

Sumber Lain:

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Kabupaten Cilacap dalam Angka Tahun 2021.